

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

Akuntansi menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) sebagaimana ditulis oleh (Mene, 2018). Akutansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang menggunakan cara tertentu dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi digunakan untuk mencatat, meringkas, menginterpretasikan, melaporkan, data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. *Accounting Principle Board* dalam Statement No. 4, yaitu akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan logis di antara tindakan alternatif (Uno et al., 2019). Dari definisi akuntansi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dijalankan untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan yang bersifat informatif sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan

keputusan. Akuntansi juga sering diartikan dengan seni mencatat, di mana pencatatan transaksi yang bernilai uang dilakukan secara berkala sehingga dapat menghasilkan informasi kuantitatif dari suatu entitas ekonomi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Harahap (Harahap, 2011) mengatakan bahwa, Akuntansi adalah menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut uang atau nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan.

Menurut (Dewi Utari, Ari Purwanti, 2014), informasi akuntansi itu memiliki tiga tujuan yaitu memberikan pelaporan kepada manajemen untuk :

- a. Membuat keputusan-keputusan rutin bisnis (kegiatan operasi) dan keputusan-keputusan khusus (investasi jangka panjang).
- b. Memberikan pelaporan kepada pihak luar perusahaan yaitu pemegang saham, lembaga keuangan dan lain-lain.
- c. Memberikan informasi kepada pihak dalam perusahaan yaitu kepada berbagai level manajemen.

Menurut (L.M.Samryn, 2012), Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informalnya. proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa penyedia informasi tentang bisnis dan transaksi keuangan yang

disajikan dalam bentuk laporan yang berguna bagi pengambil kebijakan ekonomi. Agar laporan keuangan yang dibuat memenuhi syarat ketentuan akuntansi maka diperlukan adanya standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis indonesia (Cahyono, 2011).

2. Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya di mana, kerangka konseptual mirip dengan konstitusi yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan dan menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Standar dan prinsip akuntansi yang digunakan di Indonesia disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sendiri merupakan suatu organisasi yang menaungi profesi akuntan di Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957, tak hanya menaungi para akuntan namun IAI juga berperan penting dalam rangka penyusunan standar akuntansi (Lutfiaazahra, 2015). SAK sendiri diperlukan agar menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan. Tak hanya itu, SAK juga mengatur dua hal dalam penyusunan laporan keuangan yakni standar pengukuran dan standar pengungkapan. Standar pengukuran yang dimaksud ialah pengaturan terhadap pengukuran dari setiap transaksi yang terjadi. Standar pengungkapan sendiri mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu kejadian, transaksi, maupun

informasi keuangan yang harus diungkapkan agar tidak menimbulkan kesesatan bagi pengguna informasi laporan keuangan (Lutfiaazahra, 2015).

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Pada tahun 2009, DSAK IAI telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun, seiring perkembangannya, yang terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2016. Kemudian, Pada pertengahan tahun 2015 Ikatan Akuntan Indonesia menyusun pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK-EMKM). SAK-EMKM diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah

1 Januari 2018. Penerapan ini diperkenankan, dengan berlakunya SAK-EMKM.

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah maka standar ini dimaksudkan untuk:

- a. Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan menengah diperuntukkan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah
- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukkan bagi entitas yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Menurut (Strait, 2014) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakai informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan IAI (EMKM, 2016) mengemukakan Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut dapat meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan posisi laporan keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. (Indonesia, 2015). Tujuan laporan keuangan menurut (EMKM, 2016) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba masa depan.

- d. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.
- f. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan menyajikan akun-akun aktiva, pasiva, dan ekuitas. Selain laporan posisi keuangan, ada pula laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan perusahaan atau entitas bisnis menghasilkan keuntungan pada suatu periode waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tambahan dan rincian yang disajikan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh entitas (EMKM, 2016).

5. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Penyajian Wajar

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Pengungkapan

diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- 1) Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- 2) Representasi tepat: informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- 3) Keterbandingan: Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- 4) Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.
- 5) Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

b. Penyajian Yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

1) Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan.

2) SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah karena penerapan paragraf di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, jika reklasifikasi tidak praktis. Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan.

c. Informasi Komparatif

Kecuali dinyatakan lain oleh SAK EMKM, entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

d. Laporan Keuangan

Laporan keuangan minimum terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi selama periode;
- 3) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Karena mensyaratkan jumlah komparatif, maka laporan keuangan

lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

e. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulang bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan:

- 1) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan;
- 2) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan;
- 3) Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan
- 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

f. Tujuan laporan keuangan

menurut *Accounting Principle Board Statement* no.4 mengklasifikasikan tujuan menjadi tujuan khusus, tujuan umum dan tujuan kualitatif, tujuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

- 1) Tujuan Khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan –perubahan lainnya di dalam laporan keuangan.
- 2) Tujuan Umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat:
 - (1) Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya;
 - (2) Mengajukan pendanaan dan investasinya;
 - (3) Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen;
 - (4) Menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya.
- (b) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat:
 - (1) Menyajikan ekspektasi pengembalian dividen kepada para investor;
 - (2) Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawannya, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk perluasan usaha;
 - (3) Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian kepada manajemen;
 - (4) Menyajikan profitabilitas jangka panjang.
- (c) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.
- (d) Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban.

(e) Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan.

g. Tujuan Kualitatif dari akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Relevansi, yang artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka
- 2) Dapat dimengerti, yang artinya tidak hanya informasi tersebut harus jelas, tetapi para pengguna juga harus memahaminya.
- 3) Dapat diverifikasi, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran – pengukuran yang independen, dengan menggunakan metode – metode pengukuran yang sama.
- 4) Netralitas, yang artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan – kebutuhan tertentu dari pengguna – pengguna yang spesifik.
- 5) Ketepatan waktu, yang artinya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 6) Komparabilitas (daya banding), yang secara tidak langsung berarti perbedaan – perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan.
- 7) Kelengkapan, yang artinya adalah telah dilaporkannya seluruh informasi yang “secara wajar” memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain.

8. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan posisi keuangan (*Statement Of Financial Position*) lazimnya dikenal sebagai neraca (*Balance Sheet*). Menurut (Kartikahadi, 2012) Laporan posisi keuangan atau neraca adalah “suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan atau neraca mempunyai 2 bentuk format yaitu bentuk laporan (*Staffel*) dan bentuk akun (*Skontro*). Dalam bentuk laporan, aset dilaporkan terlebih dahulu di bagian atas kemudian di bagian bawahnya dilaporkan kewajiban dan ekuitas. Sedangkan bentuk akun, aset dilaporkan sebelah kiri sedangkan kewajiban dan ekuitas dilaporkan sebelah kanan, kewajiban di laporkan lebih dahulu baru melaporkan ekuitas di bawahnya.

Menurut IAI dalam (EMKM, 2016) Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas menurut SAK EMKM dapat mencakup akun-akun :

a) Informasi Yang Disajikan

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut :

1) Kas dan setara kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai

pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling likuid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca (pemakai) laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomik. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (Indonesia, 2013), kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kreditor sangat memperhatikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dengan informasi tersebut dan informasi lain yang terkait, kreditor dapat memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan kredit atau menolaknya. Investor juga menaruh perhatian pada informasi tentang kas untuk memutuskan akan mempertahankan investasinya, menambah atau bahkan menariknya dari perusahaan.

2) Piutang

Piutang adalah tagihan yang wajib dilunasi oleh pembeli. Dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan hak yang dapat diklaim oleh individu, perusahaan, organisasi dari adanya transaksi secara kredit.

Tagihan yang ada kemudian dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran berupa uang, barang, maupun jasa sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Untuk rentang waktu yang

berlaku atau dikenal dengan masa jatuh tempo, piutang umumnya berkisar antara 30 hari sampai dengan 60 hari.

3) Persediaan

Persediaan menurut PSAK No. 14 Tahun 2015 adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

4) Aset tetap

aktiva tetap adalah bentuk aset yang bisa digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Biasanya aset tetap berupa investasi perusahaan, misalnya, gedung kantor, pabrik, peralatan pabrik, peralatan kantor, hingga hak kekayaan intelektual (HAKI) seperti hak paten dan hak cipta.

5) Kewajiban

Kewajiban dapat digambarkan sebagai transaksi yang belum dibayar antara dua pihak. Dalam dunia akuntansi, kewajiban didefinisikan sebagai jumlah yang terutang sebagai akibat dari transaksi komersial atau pertukaran barang atau jasa.

Kewajiban ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika jangka waktu pembayarannya pendek (12 bulan atau kurang). Sebaliknya, utang jangka panjang memiliki jatuh tempo yang lebih lama (12 bulan atau lebih).

Selain itu liabilitas atau kewajiban dalam akuntansi mengacu pada sebuah hal atau kondisi tanggung jawab kepada barang atau jasa yang dituang kepada pihak lainnya. Tidak harus selalu berkaitan dengan transaksi bisnis, kewajiban ini bisa meliputi pajak baik pajak tanah, pajak usaha, pajak individu dan lain sebagainya.

6) Ekuitas.

Ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban.

Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki perusahaan.

Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

b) Klasifikasi Aset Dan Liabilitas

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) Diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek, jika :

- (a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan
- (c) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan: atau

(d) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

9. LAPORAN LABA RUGI

a. Laporan Laba Rugi (*Profit & Loss Statement/Income Statement*) merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dalam jangka waktu tertentu (Strait, 2014). Menurut (Hery, 2012) Laporan Laba Rugi dapat disusun dalam dua bentuk pilihan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk langsung (*Single-Step*) Laporan laba rugi dengan bentuk langsung menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai faktor penentu laba/rugi bersih. Seluruh pendapatan maupun beban baik berasal dari kegiatan normal perusahaan maupun kegiatan diluar perusahaan atau pendapatan dan beban lain-lain digabungkan menjadi satu jumlah pendapatan dan beban.
- 2) Bentuk Bertahap (*Multiple-Step*) Laporan laba rugi dalam bentuk bertahap menekankan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih, di mana bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan bagian non operasi. Menurut IAI dalam (EMKM, 2016) entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode .

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Beban keuangan
- (c) Beban pajak.

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

10. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan, mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya.

a. Informasi Yang Disajikan

Catatan atas laporan keuangan memuat

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi;

- 3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut IAI dalam (EMKM, 2016) Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis di mana setiap akun dalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang berisikan tambahan memuat:

- (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- (c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

11. Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP

Sebelum diberlakukannya SAK EMKM sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan UMKM, dasar penyusunan laporan keuangan yang

digunakan ialah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau dikenal dengan SAK ETAP. Di mana entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan bagi pengguna eksternal. SAK ETAP sendiri bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sebagai pedoman penyusunan laporan keuangannya, selain itu juga dapat mempermudah proses audit, dan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK ETAP dapat digunakan oleh perusahaan saat mengajukan pembiayaan bagi pembangunan usahanya. Tak hanya itu, SAK ETAP lebih mudah diimplementasikan karena lebih sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Adapun beberapa penyederhanaan dalam SAK ETAP ialah:

- a. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif
- b. Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai wajar revaluasi atau nilai wajar.
- c. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM Indonesia yang maju dan mandiri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK-EMKM) pada tanggal 18 Mei 2016 dan efektif diberlakukan per 1 Januari 2018. Dengan disahkannya ED SAK-

EMKM ini, akan melengkapi standar akuntansi keuangan di Indonesia yang berdiri dengan 3 pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, SAK EMKM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dengan pedoman dan standar yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP yang sebelumnya diberlakukan bagi UMKM.

12. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM adalah jenis usaha yang jumlahnya paling banyak di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil masih beragam. Pengertian mengenai UKM juga masih relatif, Sehingga adanya batasan diperlukan untuk menimbulkan definisi-definisi dari berbagai segi (Hutagaol, 2012).

UKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahannya. saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

UKM Merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. UKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapat negara Indonesia (Wiyani, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut (Rudianto, 2012) Terdapat tiga bidang usaha yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perusahaan jasa , yaitu perusahaan yang produknya adalah bersifat non fisik yang di mana kegiatannya menyediakan jasa untuk pelanggan.
- b) Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/ konsumen.
- c) Perusahaan manufaktur , yaitu perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1

Peneliti Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Hasil
Moudy Olyvia Uno, Lintje Kalangi, Rudy J. Pusung	2019	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Rumah Karawo Di Kota Gorontalo	Pengelola UMKM belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang berlaku.
Baiq Widiastiawati, Denni Hambali	2020	Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM UD Sari Bunga	Pemilik UD Sari Bunga belum memahami tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). Pencatatan dan penyusunan laporan pembukuan yang masih sangat sederhana dan sesuai dengan dengan kebutuhan pemahaman pemilik.
Fransiska Wahyu Lestari, Yohanes Suharsana, Devi Yani	2022	Implementasi SAK EMKM dalam Penyajian Laporan Keuangan pada UMKM Bidang Industri Pangan	Penyajian laporan keuangan pada UMKM Bidang Industri Pangan Kelurahan Hadimulyo Timur belum menerapkan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mendalam terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sumber : <https://scholar.google.com/>

Perbedaan dari tiga penelitian terdahulu yaitu pada jenis entitas yang diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang kesiapan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Pada penelitian yang diteliti sebelumnya adalah kesiapan untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan Populasi penelitian ini adalah UMKM di Kelurahan Hadimulyo Timur yaitu sebanyak 40 UMKM Bidang Industri yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro. Dan berdasarkan hasil survey lapangan, sampel yang di dapat untuk industri pangan adalah sebanyak 17 UMKM. Sedangkan dalam penelitian ini obyek yang diteliti hanya difokuskan pada UMKM UD. Sinar Sentosa Abadi.

C. Kerangka Pikir

Gambar. 2.1
Kerangka Pikir
Analisis Laporan Keuangan UD. Sinar Sentosa Abadi

